

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar belakang

Kekuasaan dan legitimasi merupakan konsep yang seringkali kita temui namun tampak begitu kabur. Masyarakat pada umumnya mengetahui makna dari kekuasaan namun sebagian besar dari masyarakat tidak bisa mendeskripsikan makna dari kekuasaan secara langsung. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa masyarakat tidak peduli akan kekuasaan yang terutama yang berkaitan dengan proses politik walaupun sebenarnya mereka cukup mengkhawatirkan kelangsungan perpolitikan di Indonesia.

Kekuasaan sangatlah penting untuk berbagai kepentingan baik itu kepentingan perseorangan maupun kepentingan kelompok. Dengan legitimasi maka seseorang dapat berkuasa sehingga dapat memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Untuk itu tidak sedikit individu yang menginginkan kekuasaan yang berlegitimasi. Salah satu cara untuk memperoleh kekuasaan yang berlegitimasi adalah dengan memiliki sebuah jabatan. Sebuah jabatan pada umumnya memiliki kekuasaan, namun besar kecilnya kekuasaan dapat diukur berdasarkan tinggi rendahnya suatu jabatan itu sendiri. Salah satu jabatan tertinggi yang ada di pemerintahan desa adalah kepala desa.

Kepala desa merupakan jabatan tertinggi yang ada di pemerintahan desa. Tidak sedikit pula masyarakat yang berlomba-lomba dalam mendapatkan jabatan seorang kepala desa. Hal tersebut dapat dilihat dengan partisipan dan kandidat

calon kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan tersebut bahkan tidak sedikit pula calon yang menghabiskan dana hingga ratusan juta. Jabatan kepala desa atau lurah merupakan orang yang mempunyai kekuasaan yang sah menyangkut urusan desa. Ia dipilih melalui pemilihan umum, disetujui oleh kecamatan dan akhirnya diangkat oleh kabupaten di bawah yurisdiksi pemerintahan provinsi. Tugasnya antara lain mengawasi proyek pembangunan, memelihara hubungan dengan otoritas yang lebih tinggi, dan menangani masalah-masalah yang peka mengenai keamanan dan pembinaan politik.<sup>1</sup>

Dalam mendapatkan jabatan kepala desa tersebut berbagai macam faktor dapat mendukung seseorang agar terpilih menjadi kepala desa. Mereka harus meyakinkan beberapa ribu masyarakat dengan berbagai macam sifat dan karakteristik. Untuk itu dalam perebutan kekuasaan calon-calon memiliki strategi-strategi khusus untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat. Namun di setiap daerah model perebutan kekuasaan desa berbeda-beda dan terkadang menggunakan cara-cara yang unik tergantung dengan karakteristik masyarakatnya.

Salah satu contoh perebutan kekuasaan yang ada di desa Singkalanyar kecamatan Prambon dimana masyarakatnya merupakan masyarakat yang heterogen. Masyarakat desa Singkalanyar bersifat heterogen dikarenakan oleh banyaknya warga yang merantau untuk memperoleh kehidupan yang layak namun pada akhirnya mereka kembali ke kampung halaman mereka untuk berkumpul dan tinggal bersama keluarga besar mereka, selain itu juga adanya pendatang yang

---

<sup>1</sup> Hans Antlöv, *Kepemimpinan Jawa: perintah halus, pemerintah otoriter* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.2001) h.108

datang dari berbagai daerah di Indonesia sehingga menjadikan sifat dan karakteristik masyarakatnya berbeda-beda.

Perebutan kekuasaan kepala desa pada tahun 2009 lalu memperoleh hasil yang cukup mencengangkan dimana kepala desa yang terpilih bukan berasal dari golongan tua melainkan merupakan golongan muda. Jauh sebelum pemilihan desa tahun 2009 berlangsung para pemuda yang berada di desa Singkalanyar berinisiatif untuk membuat paguyuban pemuda desa. paguyuban desa ini berpartisipasi dalam kegiatan, pembangunan maupun pelaksanaan pemerintahan desa. pemuda desa bekerjasama dengan pemerintah desa dalam pembangunan kantor dan juga balai desa. Warga setempat sangat mendukung dengan adanya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa beserta pemuda desa. bahkan mereka tidak segan untuk memberikan sumbangan materil maupun moril demi kemajuan pembangunan desa mereka.

Kegiatan para pemuda desa tersebut diisi dengan kegiatan-kegiatan positif dengan tujuan untuk memberikan kontribusi kepada desa mereka. Paguyuban pemuda desa ini memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada saat pemilihan kepala desa di tahun 2009 yang mana salah satu tokoh pemuda mencalonkan diri sebagai kepala desa atas dukungan dari para pemuda. Beliau berhasil merangkul seluruh lapisan masyarakat baik generasi muda maupun generasi tua dengan menjadi salah satu tokoh paguyuban pemuda desa.

Tanpa maupun dengan disadari masyarakat memilih kepala desa muda tersebut berdasarkan harta benda dan kekayaan. Beliau dapat menjadi salah satu

anggota aktif dari peguyuban tersebut karena sumbangan materiil maupun moril. Selain itu dengan terpilihnya beliau diharapkan pembangunan desa akan tetap berlangsung dan lebih di prioritaskan.

Faktor kekayaan memang sangat sering kita temui dalam perebutan kekuasaan. Para calon-calon penguasa memanfaatkan kekayaan mereka dengan berbagai cara dengan tujuan memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Namun selain faktor kekayaan dan harta benda masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mendukung seseorang untuk memperoleh kekuasaan maupun legitimasi. Untuk mendapatkan kekuasaan seseorang memerlukan upaya yang cukup besar begitu pula dalam mempertahankannya. Biasanya upaya memperoleh maupun mempertahankannya bisa dilihat melalui karakteristik masyarakatnya.

Sebagai contoh upaya seorang pemimpin dalam memperoleh kekuasaannya adalah ketika masa kampanye pemilihan kepala daerah berlangsung. Berbagai macam strategi dicurahkan demi mencapai tujuan memperoleh kekuasaan. Mulai dari pendekatan secara personal hingga penyebaran atribut-atribut kampanye ke setiap lapisan masyarakat. Hal ini akan lebih memudahkan jika para pencari kekuasaan tersebut memahami dan mempelajari karakteristik masyarakat di suatu daerah tertentu sehingga pendekatan akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari kampanye tersebut.

Pada daerah dimana masyarakatnya mayoritas merupakan masyarakat yang masih mempertahankan dan menjunjung tinggi tradisi-tradisi kejawaan maka para pencari kekuasaan akan mengadakan suatu kegiatan masyarakat atau membagikan atribut kampanye dengan nilai-nilai tradisi jawa didalamnya seperti

menyelenggarakan pagelaran wayang atau membagikan kalender disertai dengan penanggalan kalender jawa.

Jika kampanye dihadapkan pada masyarakat yang merupakan santri maka pada umumnya akan banyak sekali diselenggarakannya pengajian-pengajian dengan mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat maupun kiyai yang berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa penguasa tidak hanya membutuhkan sumber-sumber kekuasaan untuk memperoleh kekuasaan tetapi juga memerlukan strategi kampanye agar dapat menempatkan diri sehingga memperoleh apa yang menjadi tujuannya. Hal ini tidak hanya ditujukan pada pemerintahan dalam lingkup nasional, daerah, ataupun kota. Tetapi juga dapat diterapkan pada perebutan kekuasaan di desa. Oleh karena itu ada baiknya memahami karakteristik masyarakat bisa menjadi salah satu strategi untuk memperoleh kursi kekuasaan, dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap daerah maupun desa di Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda.

Dalam upaya untuk mendapatkan kekuasaan perlu berbagai upaya begitu halnya dengan mempertahankannya. Perlu adanya upaya-upaya dalam mempertahankan kekuasaan agar masyarakat yang dipimpin member kepercayaannya kembali dan dengan begitu kekuasaan yang dimiliki tidak memudar. Salah satu upaya mempertahankan kekuasaan adalah dengan mempertahankan pula tradisi yang ada di daerah tersebut. Di desa Sonoagung kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tradisi lokal “nyadran” diselenggarakan secara turun-temurun setiap tahunnya pasca panen raya padi tepatnya Kamis Legi malam Jum’at Pahing berdasarkan kalender Jawa. tradisi ini syarat akan nilai-nilai budaya maupun agama di dalamnya.



Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dikarenakan limpahan berkah yang diwujudkan dalam hasil panen mereka. Disamping itu tradisi ini juga perwujudan agar warga setempat diberi keselamatan dan kemakmuran. Walaupun masyarakat mulai bergeser dan telah mengenal pengetahuan dan juga teknologi, tradisi ini masih tetap mendapatkan perhatian dan tetap di pertahankan. Masyarakat desa Sonoageng masih mempercayai adanya *danyang* serta roh-roh para leluhur. Sehingga salah satu tujuan diadakannya tradisi ini adalah untuk menghormati roh-roh para leluhur khususnya roh-roh para pendiri desa. Secara umum prosesi dari pada *nyadran* yang dilakukan oleh warga adalah dengan membersihkan makan, *nyekar*, *kenduri*, dan makan bersama yang biasa dilakukan di sekitar *pundhen* dan makam keramat. Makam tersebut dipercaya sebagai makam daripada orang yang berjasa dalam pendirian desa. Tidak hanya makan bersama di *pundhen* saja, setiap rumah juga masak besar untuk menyambut perayaan tersebut untuk makan bersama dengan keluarga besar serta sanak saudara. Selain itu perayaan *nyadran* juga dimeriahkan dengan pagelaraan seni budaya. Pagelaran seni budaya biasanya dilaksanakan pada saat iring-iringan rombongan yang membawa sesajen dan arak-arakan menuju ke makam, dan juga pada malam harinya yang bertepatan pada Kamis Legi malam Jum'at Pahing.

Pada malam hari itu banyak pagelaran seni yang dipertontonkan seperti wayang kulit, ludruk, jaranan, reyog, maupun orkes. Kemeriahan tradisi ini sangat diminati warga, bahkan banyak warga yang berbondong-bondong datang dari luar desa hingga luar kota untuk memeriahkan tradisi ini. Salah satu acara yang berperan andil dalam tradisi *nyadran* ini adalah pemerintah desa mengadakan

Basar selama seminggu sebelum hari keramat yang jatuh pada Kamis Legi malam Jum'at Pahing berdasarkan kalender Jawa. Banyak pedagang percaya bahwa jika mereka paling tidak pernah menggelar dagangan di basar nyadran maka rejeki mereka akan melimpah. Untuk itu banyak sekali pedagang yang turut serta dalam memeriahkan tradisi ini. Tradisi atau upacara ritual ini merupakan salah satu cara penguasa mempertahankan kekuasaannya. Kemeriahan tradisi ini juga dapat dianggap sebagai keberhasilan kepala desa dalam memajukan tradisi atau kebudayaan desa.

Upacara-upacara tertentu merupakan salah satu proses penyerapan dan penghimpunan, dimana dalam tradisi upacara tersebut ada praktek-praktek menghimpun dan penyerapan kekuasaan seperti meditasi, pembacaan doa-doa dan mantra, dan sebagainya.

Setiap desa memiliki tradisi budaya yang dipertahankan dan menjadi ciri khas masing-masing desa. Desa Watudandang merupakan salah satu desa yang memiliki keunikan sendiri. Berbeda dengan desa-desa lain di kecamatan Prambon, desa Watudandang memiliki masyarakat yang beragam. Desa Watudandang memiliki tempat keramat yaitu kuburan mbah Nduro sepanjang 2 meter yang mana merupakan peninggalan kerajaan Mojopahit. Walaupun begitu ada beberapa pondok pesantren di desa Watudandang. Hal ini menandakan bahwa masyarakat desa setempat memiliki pembelahan kultur varian seperti yang dijelaskan oleh Clifford Geertz. Dengan adanya keberagaman di desa watudandang penelitian ini akan meneliti tentang factor yang mendukung kepala desa memperoleh kekuasaannya dan bagaimana upaya kepala desa dalam mempertahankan legitimasi yang dimilikinya.

## **I.2 Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa yang mendukung Kepala Desa dalam memperoleh kekuasaan?
2. Bagaimana upaya Kepala Desa dalam mempertahankan legitimasi yang dimilikinya?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada masalah yang hendak diteliti diatas, maka tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan tentang faktor-faktor yang mendukung Kepala Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam memperoleh kekuasaan.
2. Mendiskripsikan bagaimana upaya kepala Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam mempertahankan legitimasi yang dimilikinya

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Dengan kata lain penelitian memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu politik dalam memahami faktor-faktor pendukung dalam memperoleh kekuasaan serta upaya dalam mempertahankan legitimasi tersebut. Secara praktis berarti hasil penelitian diharapkan dapat mendiskripsikan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun bahan pelengkap untuk studi lanjutannya.



Untuk pemerintahan Desa yang mencangkup Kepala desa dalam penelitian ini diharapkan dapat mempergunakan legitimasi yang diberikan masyarakat dan mengetahui akan pentingnya legitimasi yang telah diberikan masyarakat demi kebaikan bersama.

Untuk masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik mulai dari tingkat desa. Serta agar dapat mengetahui pula pentingnya Legitimasi kekuasaan dari seorang pemerintah demi kepentingan masyarakat bersama. Hasil penelitian ini juga memberikan manfaat langsung kepada kepada Penulis. Penulis mampu memahami praktik dalam mencari maupun mempertahankan kekuasaan. Selain itu hal ini akan menambah kecakapan penulis dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang akan berguna untuk kedepannya.

## **I.5 Kerangka Teori**

### **I.5.1 Teori Kekuasaan**

Miriam Budiardjo dalam *Dasar-dasar Ilmu Politik* mengemukakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah-laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari perilaku.<sup>2</sup>

Sedangkan Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa ada enam konsep yang dapat menggambarkan bentuk-bentuk dari kekuasaan, yaitu:<sup>3</sup>

- (1.) *Influence* yang berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk merubah sikap maupun perilakunya tanpa adanya paksaan atau intervensi.

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 ) h.35

<sup>3</sup> Ramlan Surbakti , *memahami ilmu politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1984)h.57

- (2.) *Persuasion* yang berarti kemampuan dalam meyakinkan orang lain dengan melalui argumentasi untuk melakukan sesuatu.
- (3.) *Manipulasi* yang berarti kemampuan mempengaruhi orang lain, namun yang dipengaruhi tersebut tidak menyadari bahwa tingkah lakunya mematuhi keinginan dari sipemegang kekuasaan.
- (4.) *Coercion* yang berarti peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak sipemegang kekuasaan.
- (5.) *Force* yang berarti penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu.
- (6.) *Authority* (Kewenangan) yang berarti hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik.

Jika dilihat dari uraian tentang kekuasaan tersebut. Maka akan tercapai dari inti dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan sangat berarti luas. Bahkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat tanpa disadari semua berhubungan dengan kekuasaan.

Untuk memahami kekuasaan Surbakti juga meninjau kekuasaan berdasarkan enam dimensi, antara lain adalah<sup>4</sup>

1. Potensial dan Aktual, yang mana kekuasaan dapat ditinjau berdasarkan sumber kekuasaan potensial seperti kekayaan, popularitas, status sosial

---

<sup>4</sup> Ibid h.59

dan sebagainya. Kekuasaan aktual adalah ketika seseorang telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya dalam kegiatan politik.

2. **Konsensus dan Paksaan**, adalah jika dilihat dari aspek konsensus kekuasaan akan cenderung melihat elit politik sebagai orang yang tengah berusaha menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan. Kekuasaan konsensus merupakan persetujuan secara sadar dari pihak yang dipengaruhi, untuk mendapatkan ketaatan kekuasaan konsensus menggunakan sarana-sarana seperti nilai kebaikan bersama, moralitas dan ajaran agama, keahlian, dan popularitas pribadi. Dari aspek paksaan maka kekuasaan akan cenderung memandang politik sebagai perjuangan, pertentangan, dominasi maupun konflik. Pada umumnya rasa takut merupakan alasan untuk menaati kekuasaan paksaan.
3. **Positif dan Negatif**, Kekuasaan positif ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk menapai tujuan yang penting dan diharuskan. Sedangkan kekuasaan negatif ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya dipandang tidak perlu tetapi juga merugikan pihak lainnya.
4. **Jabatan dan Pribadi**, Kekuasaan terkandung erat dalam Jabatan-jabatan. Kekuasaan dapat dilihat tanpa melihat kualitas pribadinya melalui jabatan. Oleh karena itu pada masyarakat maju baik jabatan maupun kualitas pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber kekuasaan. Sebaliknya pada masyarakat sederhana, kekuasaan didasarkan atas kualitas pribadi tampak lebih menonjol dibandingkan dengan kekuasaan yang terkandung dalam jabatan.

5. Implisit dan Eksplisit, Kekuasaan Implisit ialah pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit ialah pengaruh yang secara jelas terlihat dan dirasakan.
6. Langsung dan Tidak Langsung, Kekuasaan langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung, tanpa melalui perantara. Kekuasaan tidak langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Namun untuk memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan tersebut perlu adanya upaya. Upaya-upaya tersebut terkadang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Hal ini dikhususkan pada kekuasaan menurut budaya Jawa yang sangat bertolak belakang dengan kekuasaan menurut budaya Barat.

Benedict Anderson dalam tulisannya *The Idea of Power in Javanese Culture* (1972) membandingkan kedua versi kekuasaan tersebut. Anderson melihat bahwa dalam kebudayaan Jawa masyarakat lebih melihat kekuasaan itu sebagai kekuatan energi yang sakti dan bersifat keramat dan secara konkret ada dalam lingkungan alam manusia, namun energi tersebut berada diluar diri orang yang mempergunakannya, bersifat sangat spiritual. Kekuasaan adalah daya yang tidak dapat diraba, penuh misteri, dan bersifat ketuhanan yang menghidupkan seluruh alam semesta.<sup>5</sup> Dalam tradisi Jawa Kekuatan-kekuatan spiritual itu juga

---

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo (penyusun), *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan)h. 51

digambarkan melalui alam seperti batu, awan, pohon dan bahkan api. Yang kedua adalah kekuasaan bersifat homogen. Dimana semua kekuasaan berasal dari tipe dan sumber yang sama. Yang ketiga adalah jumlah keseluruhan dari kekuasaan itu tetap. Anderson menggambarkan bahwa bagi tradisi budaya Jawa Jagat raya tidak meluas ataupun menyempit, oleh karena itu kekuatan yang ada di dalamnya pun tidak akan bertambah ataupun berkurang. Maka dari itu penggunaannya secara otomatis, tidak memiliki implikasi moral dan juga tidak ada persyaratan kualitas bagi orang yang mempergunakannya. Dan pada akhirnya kekuasaan tidak mempersoalkan keabsahannya serta yang baik dan yang buruk karena berasal dari sumber yang sama (homogen).<sup>6</sup>

Berbeda dengan kekuasaan menurut budaya Jawa, budaya Barat lebih bersifat abstrak. Kekuasaan merupakan sesuatu yang tidak bisa digambarkan atau tak tampak karena merupakan bentuk dari hubungan antarmanusia. Hubungan tersebut dapat digambarkan dimana seseorang patuh kepada kemauan orang lain baik itu sukarela maupun tidak. Sumber kekuasaannya bersifat majemuk. Menurut budaya Barat sumber kekuasaan dapat diperoleh melalui kekayaan, status sosial, jabatan formal, dan sebagainya. Jumlah kekuasaannya tidak terbatas. Kekuasaan menurut kebudayaan Barat digambarkan sebagai hubungan antar manusia oleh karena itu kekuasaan hanyalah suatu abstraksi yang menggambarkan hubungan tersebut dan melalui sumber-sumber kekuasaan maka kekuasaan itu tidak ada batasnya. Jika dipandang dari segi moral maka kekuasaan mempunyai arti ganda.

---

<sup>6</sup> Ramlan Surbakti, *memahami ilmu politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1984)h.82



Seseorang dapat mempengaruhi orang lain apabila memiliki dan mampu menggunakan sumber-sumber kekuasaan.<sup>7</sup> Sumber-sumber kekuasaan sangatlah beragam. Namun secara jelas Surbakti melalui *Memahami Ilmu Politik* mengategorikan sumber-sumber kekuasaan, yaitu:

- Paksaan fisik, sebagai contoh Penjara, Senjata, teknologi, kerja paksa, dan lain-lain.
- Kekayaan dan Harta Benda, seperti emas, uang, barang-barang berharga, dan lain-lain
- Popularitas pribadi, seperti artis terkenal, pemimpin yang kharismatik yang mana mereka memiliki popularitas pribadi atau terkenal.
- Jabatan, Jabatan sangat jelas merupakan sumber kekuasaan dikarenakan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut. Bahkan sumber kekuasaan ini merupakan sumber kekuasaan yang cukup ampuh. Semakin tinggi jabatan maka semakin banyak pula sumber kekuasaan yang dimiliki dan semakin luas juga pengaruh dari kekuasaan tersebut.
- Keahlian, seperti keterampilan, pengetahuan maupun teknologi. Sebuah keahlian sangatlah penting, terlebih ketika berada dilingkup masyarakat yang masih berkembang dimana masih sangat sedikit orang yang memiliki keahlian khusus.
- Status Sosial, pada masyarakat tertentu status sosial dapat menjadi sumber kekuasaan yang penting. Ketika dihadapkan pada masyarakat

---

<sup>7</sup> *Ibid* h.81

yang menghormati kasta, maka kasta tertinggi seperti kasta Brahmana, maupun keturunan bangsawan akan sangat berpengaruh.

- Pemuka, Pemuka agama maupun pemimpin suku memiliki sumber kekuasaan. Mereka ditaati oleh anggota masyarakatnya karena kebenaran agama yang “diwakili” dan disebarluaskan oleh pemimpin agama, dan adat serta tradisi yang dipelihara dan ditegakkan oleh pemimpin suku tersebut.
- Massa yang terorganisasikan, seperti petani, buruh, sopir dan masih banyak lagi dapat pula memiliki sumber kekuasaan.
- Kemampuan Pers (Media Massa), yang mana membentuk pendapat umum melalui reportase, tajuk, dan sebagainya sehingga menimbulkan persepsi yang merupakan langkah awal dari sumber kekuasaan.

Berbeda dengan teori politik Barat, mencari kekuasaan melalui konsep Jawa dapat dilihat melalui kebiasaan yang dilakukan para raja-raja terdahulu. Yang pertama adalah dengan tradisi Ortodoks, yang mana memperoleh kekuasaan yang dilakukan dengan cara melakukan praktik-praktik yoga maupun bertapa dengan sangat keras. Praktik-praktik Yoga sangatlah beragam seperti berpuasa, tidak tidur, bersemedi, tidak melakukan hubungan seksual, pemurnian ritual dan mempersembahkan sesaji.<sup>8</sup> Tujuan daripada praktik-praktik tersebut adalah untuk pemusatan cahaya dan kekuasaan. Tradisi Ortodoks ini menganggap kenikmatan-kenikmatan duniawi sebagai sesuatu yang jahat atau bahkan tidak bermoral sehingga dapat mengalihkan atau mengacaukan pikiran. Hal ini menyebabkan hilangnya kekuasaan.

---

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo (penyusun), *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan) h.53

Pandangan yang kedua adalah tradisi yang heterodoks. Dalam tradisi ini kekuasaan dicari dengan mengikuti hawa nafsu dengan dalih bahwa jika mengikuti hawa nafsu tersebut hingga ke tahap yang paling ekstrem maka akan menghabiskan hawa nafsu itu sendiri, sehingga pemusatan kekuasaan tidak mengalamirintangan yang lebih lanjut. Dalam sejarah, raja yang mempraktikkan tradisi ini adalah raja Kertanegara dimana kekuasaan dicari melalui mabuk-mabukan, pesta seks dan pembunuhan ritual. Kedua tradisi tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu pemusatan kekuasaan walaupun dengan cara yang sangat berbeda.

Penyerapan dan penghimpunan kekuasaan juga dapat dilakukan tidak hanya melalui bertapa namun dapat juga dilakukan melalui upacara-upacara tertentu. Beberapa upacara sangat bersifat memanggil. Sebagai contoh adalah pertunjukkan wayang yang mana lakon-lakonnya dipilih secara khusus karena simbolisme politik yang terkandung didalamnya. Dalam prakteknya rapat-rapat raksasa, pidato yang berapi-api hampir terlihat bukan merupakan tradisi melainkan secara formal diambil dari politik Barat, namun menurut kalangan yang berorientasi pada kekuasaan hal ini juga dimaksudkan untuk memusatkan dan memperlihatkan kekuasaan yang telah diserap dari berbagai sumber melalui kata-kata tertentu.

Menurut tradisi lama Jawa, cara lain untuk mencari kekuasaan adalah dengan mengumpulkan benda maupun orang-orang yang dianggap mempunyai atau mengandung kekuasaan. Pada umumnya benda-benda tersebut berupa keris, tombak, alat musik suci, maupun perhiasan yang memiliki nilai mistik.

## I.5.2 Teori Legitimasi

Ramlan Surbakti berpendapat bahwa kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik.<sup>9</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan legitimasi adalah sikap masyarakat terhadap kewenangan tersebut. Dalam arti luas legitimasi dapat diartikan sebagai dukungan masyarakat terhadap sebuah sistem/aturan/norma yang ada. Dan dalam artian sempit legitimasi dapat diartikan sebagai dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berwenang. Hal inilah yang menjadikan legitimasi sangatlah penting. Dengan legitimasi maka kestabilan politik akan tercipta, selain itu dengan dukungan dari masyarakat pemerintah dapat memperluas bidang-bidang kesejahteraan guna meningkatkan kesejahteraan tanpa adanya benturan dengan masyarakat. Pemerintahan yang tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakatnya akan sangat sulit dan menghadapi permasalahan-permasalahan yang kompleks bahkan bisa jadi tidak terselesaikan karena kesepakatan tidak terjalin antara yang memerintah dan yang diperintah. Untuk itu legitimasi mau tidak mau harus dimiliki oleh masing-masing diri para pemimpin terutama pemerintah. Berikut merupakan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan maupun mempertahankan legitimasi masyarakat:

- 1) Simbolis, dilakukan dengan memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi dan kepercayaan serta nilai-nilai budaya ke dalam bentuk simbol-simbol yang umumnya bersifat ritualistik, sakral, retorik dan mercusuar.

---

<sup>9</sup> Ramlan Surbakti, *memahami ilmu politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1984)h. 85

- 2) Materiil, dilakukan dengan menjanjikan dan memberikan kesejahteraan materiil pada masyarakat, seperti menjamin tersedianya kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, pendidikan, dll.
- 3) Prosedural, dilakukan dengan cara menyelenggarakan pemilu untuk menentukan para wakil rakyat, presiden dan wakil presiden.

Sikap antara yang memerintah dan yang diperintah dapat menentukan kadar legitimasi seorang penguasa atau jumlah dukungan terhadap kewenangan. Untuk itu kewenangan dikelompokkan menjadi empat tipe kadar legitimasi antara lain adalah<sup>10</sup>

1. Kewenangan dikatakan sebagai pralegitimasi apabila pihak yang memerintah sangat yakin memiliki hak moral untuk memerintah masyarakat. Sebaliknya, banyak pihak dari yang diperintah khususnya berbagai kekuatan yang diperintah belum mengakui hak moral.
2. Kewenangan yang tak berlegitimasi ialah hubungan kewenangan tatkala pihak yang diperintah tidak mengakui hak moral penguasa untuk memerintah, sedangkan pihak yang memerintah secara terus menerus mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara yang bercorak kekerasan. Semua oposisi atau upaya yang mendesaknya agar mengundurkan diri dihadapi dengan kekerasan.
3. Kewenangan yang berlegitimasi ialah yang diperintah mengakui dan mendukung hak moral penguasa untuk memerintah. Pemerintah yang terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum merupakan contoh hubungan kewenangan yang berlegitimasi.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* H.94



4. Kewenangan pascalegitimasi ialah dasar legitimasi yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat dan telah muncul dasar legitimasi baru yang menghendaki suatu kewenangan atas dasar legitimasi baru tersebut.

### 1.5.3 Kepemimpinan Jawa

Kepemimpinan di Jawa bukan bergantung kepada kekuasaan yang dipaksakan secara birokratis melainkan lebih menitikberatkan pada bagaimana pemimpin itu memenuhi citra ideal sebagai sosok teladan. Sosok teladan pada dasarnya digambarkan sebagai seorang pemimpin yang berjiwa kuat, memikat dan penuh dengan sifat baik. Kekuasaan sebaiknya dilaksanakan melalui perintah halus dan bukan dengan perintah langsung.

Maurer, Cederroth dan Antlöv melihat para pemimpin desa adalah status mereka baik sebagai klien maupun agen Negara.<sup>11</sup> Dalam kapasitasnya sebagai agen, diharapkan para pemimpin itu melaksanakan program dan menyalurkan dana public. Dan dalam kapasitasnya sebagai klien, mereka termasuk kelas menengah yang beruntung yang cepat berkembang. Melalui akses istimewa pada dana public, mereka menjadi anggota elit desa. Selanjutnya ada dua tipe tanggung jawab kepemimpinan antara lain:<sup>12</sup>

1. Pemimpin yang terutama berorientasi moral dengan rasa tanggung jawab kemasyarakatan yang tinggi. Pemimpin yang demikian itu merasa sangat

---

<sup>11</sup> Hans Antlöv, *Kepemimpinan Jawa: perintah halus, perintah otoriter* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001) h. 16

<sup>12</sup> *Ibid.* H. 14

risau karena mereka adalah hasil pilihan, dan mereka dibentengi oleh ekspos public, dan mendapat berkah moralitas.

2. Pemimpin dengan orientasi ke atas dan keluar. Pemangkas jabatan seperti itu diterapkan dengan mandat resmi, dibebani dengan tugas-tugas administratif dan tertarik karena akses terhadap sumber daya Negara.

Pemimpin dengan orientasi moral merasa bahwa tanggung jawab utama mereka adalah mewakili masyarakat masyarakat dan melindungi penduduk desa dari pengaruh luar. Mereka menganggap dirinya sebagai perantara di antara Negara dan penduduk desa. Idealnya seorang pemimpin moral adalah orang yang terpandang di desa itu yang mendapat kepercayaan dari, dan memiliki ikatan kekeluargaan dengan masyarakat desa, yang dilayaninya dan yang hidup bersama-sama dengannya. Pemimpin desa seringkali berada dibawah tekanan yang kuat untuk memenuhi tuntutan Negara, namun seorang pemimpin yang dihormati harus juga mengikuti norma perilaku yang telah diterima secara umum. Dalam usahanya agar dapat diterima, para pemimpin itu sering memperlihatkan diri sebagai seorang “bapak” masyarakat yang bersikap melindungi dan murah hati. Selain itu mengenai legitimasi di Jawa pemimpin mengklaim bahwa legitimasi adalah cara memelihara keadaan yang *tata tentrem*, sebuah konsep Jawa yang diterjemahkan ke dalam bahasa menjadi kedamaian dan ketertiban.

## **I.6 METODE PENELITIAN**

### **1.6.1 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian terletak di desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Terkait dengan kekuasaan kepala desa yang difokuskan pada faktor pendukung atau kemenangan sehingga kepala desa saat ini mendapatkan kekuasaan dan bagaimana upaya kepala desa tersebut untuk tetap mempertahankan legitimasinya dan eksistensinya di dalam masyarakat.

### **1.6.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa faktor-faktor pendukung atau kemenangan Sajuli sehingga memperoleh kekuasaan serta menggambarkan dan menganalisa bagaimana upaya Sajuli dalam mempertahankan legitimasi yang dimilikinya.

Metode kualitatif dimana peneliti mengamati fenomena yang terjadi dilapangan yang sifatnya menggambarkan dan menjabarkan temuan yang ada dilapangan, dan kemudian memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian diskriptif ini yaitu prosedur penelitian berdasarkan data deskriptif, yaitu berupa lisan atau tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak dirubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Informan**

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-

pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.<sup>13</sup> Peneliti secara sengaja mengambil sampling tersebut, karena dirasa mampu untuk mewakili jawaban penelitian yang diajukan melalui wawancara mendalam.

Dengan demikian, penelitian ini sengaja memilih subyek yang dirasakan mengetahui dan mengalami sendiri terkait dengan factor-faktor yang mendukung Kepala Desa untuk memperoleh kekuasaan dan bagaimana upaya Kepala Desa dalam mempertahankan legitimasi yang dimilikinya.

#### **I.6.4 Subjek penelitian**

Adapun subjek atau informan dalam penelitian ini adalah pihak- pihak yang dapat memberikan informasi terkait yaitu :

1. Kepala Desa sebagai informan utama yang merupakan subjek dalam penelitian ini. Kepala desa Watudandang yang bernama Ahmad Sajuli merupakan kepala desa yang menjabat pada periode 2012-2018. Beliau memperoleh suara terbanyak atas 5 kandidat calon kepala desa lainnya. Sosok Ahmad Sajuli begitu dikenal oleh masyarakat. Beliau dikenal sebagai sosok yang ramah, tegas dan bertanggung jawab. Beliau juga merupakan terpendang dan memiliki kekayaan yang lebih dibandingkan dengan warga setempat. Sebelum menjabat sebagai kepala desa beliau merupakan kepolisian yang sering membantu warga yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan kepolisian.
2. M. Zainal Arifin merupakan salah satu pamong desa yang menjabat sebagai Jogoboyo II. Beliau menjadi orang kepercayaan kepala desa dan membantu dalam kampanyenya dikarenakan beliau merupakan salah satu dari jaringan

---

<sup>13</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta:PT.Gelora Aksara Pratama, 2009)h.96

keluarga Ahmad Sajuli. Melalui berdialog dengan beliau peneliti mendapatkan banyak informasi terkait kemenangan dan latar belakang Ahmad Sajuli.

3. Ahmad Bani merupakan salah satu informan yang menginformasikan tentang strategi kemenangan kepala desa serta karakteristik masyarakat desa Watudandang sehingga peneliti memiliki gambaran bagaimana kepala desa menyikapi dan memperoleh suara mayoritas dari masyarakat desanya. Latar belakang Ahmad Bani merupakan salah satu tokoh masyarakat yang seringkali membantu warga setempat maupun pemerintah desa. Beliau merupakan pensiunan guru yang diberi amanah oleh warga untuk menjabat sebagai ketua rukun warga.
4. Triyani Fatkurokhmi merupakan tokoh masyarakat desa Watudandang. Beliau merupakan kepala sekolah RA Alhidayah Nanggung yang dikelola oleh keluarga dan merupakan guru yang mengajar di MTSn Sanggrahan. Beliau cukup dikenal dikarenakan oleh jabatan yang dimilikinya dan berasal dari keluarga yang cukup terpadang di desa. Peneliti mendapatkan Informasi tentang sosok kepala desa dan juga perkembangan desa.
5. Saropah merupakan masyarakat desa Watudandang. Beliau cukup baik mengenal Ahmad Sajuli dikarenakan sering dibantu dan bekerja serabutan disana. Dari perbincangan dengan beliau peneliti mendapatkan informasi yang berkaitan dengan sosok kepala desa.
6. Nurul Komariati merupakan masyarakat desa. Melalui perbincangan dengannya peneliti menemukan beberapa informasi terkait dengan perkembangan desa dan jaringan keluarga yang dimiliki oleh Sajuli (kepala desa).



7. Sarmi merupakan masyarakat desa. Melalui beliau peneliti mendapatkan informasi terkait karakteristik masyarakat desa dan bagaimana upaya kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan.

### **I.6.5 Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di desa Watudandang kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk.

### **I.6.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data adalah usaha untuk mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diambil yaitu dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya) dan objektif ( dengan kenyataan). Adapun langkah- langkahnya sebagai berikut :

#### **A. Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.<sup>14</sup> Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap penggunaan sumber-sumber kekuasaan oleh subjek penelitian. Peneliti mengamati dan mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan sumber-sumber kekuasaan subjek penelitian dan bagaimana upaya subjek penelitian untuk memperoleh kekuasaan yang memiliki keabsahan atau legitimasi.

#### **B. Wawancara**

Metode wawancara adalah pengumpulan data melalui komunikasi secara langsung dengan subjek penelitian dilokasi penelitian, tujuannya karena peneliti

---

<sup>14</sup> Ibid. H.101

ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai legitimasi dan kekuasaan kepala desa serta pendapat masyarakat terkait hal tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara yang terstruktur. Dimana dalam wawancara ini peneliti telah mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara.<sup>15</sup> Wawancara dilakukan kepada informan kunci maupun informan pendukung yang dipilih melalui Purposing Sampling.

### **I.6.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan data yang telah diperoleh. Tujuan pokok penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*in-dept interview*) maupun observasi.

Dalam wawancara peneliti merekam melalui *recorder handphone* sehingga hasil rekaman tersebut dapat diperdengar dan dijadikan sebuah transkrip wawancara. Selain itu peneliti juga menulis poin-poin penting pembicaraan sehingga hal ini dapat membantu penulisan transkrip wawancara kepada informan apabila rekaman tersebut rusak maupun hilang.

Setelah data diperoleh kemudian melakukan reduksi data dengan cara membuat abstraksi kemudian dilakukan penafsiran data yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan kajian teori yang telah disusun sebelumnya.

Setelah itu peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan dan kevaliditasan data dengan cara memperpanjang observasi maupun pengamatan yang terus-

---

<sup>15</sup> Ibid. H.107

menerus serta diskusi dengan teman, kakak angkatan atau bahkan orang yang dianggap mempunyai pemahaman dan pengetahuan lebih berkenaan dengan pokok permasalahan yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan guna mendapatkan data yang tepat, akurat dan mudah untuk dipahami.

